

# PELANGGARAN PERATURAN KEUANGAN, TEKANAN KEUANGAN, KINERJA KEUANGAN DAN PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN: SINYAL PERUSAHAAN UNTUK MENDAPATKAN KEPERCAYAAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Oleh

Fernando Africano<sup>1</sup>

Dosen Tetap Prodi Akuntansi STIE Multi Data Palembang

[fernandoafricano@stie-mdp.ac.id](mailto:fernandoafricano@stie-mdp.ac.id) Telp/Hp : +62 812 78 766 744

Ricardo Parlindungan<sup>2</sup>

[ricardoparlin@stie-mdp.ac.id](mailto:ricardoparlin@stie-mdp.ac.id)

Info Artikel :

Diterima 16 Sept 2016

Direview 30 Sept 2016

Disetujui 21 Nov 2016

## ABSTRACT

*The disclosure of corporate social responsibility (CSR) is the duty of an enterprise, it is worth to be known which factors affecting CSR disclosure. This study empirically examined the related theory of CSR with the data about CSR disclosure of non financial companies in the Indonesia Stock Exchange (IDX). Variables used in the research are violation of financial regulations, financial distress and financial performance to disclosure of corporate social responsibility (CSR). This research used quantitative method with secondary data. The secondary data obtained from Financial Services Authority (OJK) and Indonesia Stock Exchange (IDX). The testing done with SPSS. The results shown that the financial distress affected CSR to CSR disclosure.*

**Key Word : financial distress, csr, financial performance**

## Pendahuluan

Perwujudan dari tanggung jawab sosial-lingkungan perusahaan secara implisit tercermin melalui praktik Corporate Social Responsibility (CSR). CSR didefinisikan sebagai tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat; mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, sejalan dengan

hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional; serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh (Draft ISO 26000, Guidance on social responsibility 2010:3). Saat ini perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI mengungkapkan CSR tersebut melalui laporan tahunan (*annual report*)

Belakangan ini pelanggaran laporan keuangan cukup sering terjadi, hal ini menimbulkan dampak yang cukup luas. Salah satu dampaknya adalah berkurangnya kepercayaan pemangku kepentingan. Salah satu cara lain perusahaan untuk meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan adalah melalui

laporan CSR. Menurut *legitimacy theory*, perusahaan hanya dapat mempertahankan operasi bisnisnya jika mendapatkan legitimasi dari masyarakat dan pemerintah (pemangku kepentingan), dengan cara mematuhi aturan serta norma yang berlaku ditempat tersebut (Deegan, 2013). Selaras dengan teori tersebut, beberapa literatur dan penelitian terdahulu yang telah meneliti fenomena tindak kecurangan dan pelanggaran aturan yang dilakukan perusahaan, menyatakan tindakan tersebut merupakan salah satu bentuk pengkhianatan terhadap aturan dan norma sosial yang berlaku di masyarakat, merugikan banyak *stakeholder*, dan dapat berujung pada pemberian sanksi atau penghentian operasi bisnis (*de-legitimization*) atas perusahaan yang melakukannya (Lanis dan Richardson, 2012)(Slemrod, 2004)(Freedman, 2003)(Landolf, 2006)(Williams, 2007) (Christensen dan Murphy, 2004) (Sikka, 2010) (Shabib 2015).

Selanjutnya, pertentangan perspektif tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut. Beberapa peneliti dan penulis yang menggunakan *legitimacy theory* sebagai alat analisa, menemukan perusahaan-perusahaan yang tidak mengikuti atau melanggar suatu aturan atau norma yang berlaku di tempat operasinya, cenderung mencoba untuk mengalihkan perhatian publik dengan menggunakan media seperti laporan tahunan khususnya terkait pengungkapan informasi tanggung jawab sosial perusahaan yang hari ini menjadi salah satu acuan pengambilan keputusan ekonomi bagi para investor, konsumen, pemerintah dan *stakeholder* lainnya (Islam dan Deegan, 2010) (Gamerschlag *et al*, 2011) (Lanis dan Richardson, 2012). Dengan harapan perusahaan tersebut terhindar dari anggapan telah melanggar aturan atau norma sehingga citra perusahaan dapat

tetap terjaga (Deegan *et al* 2002) (Lanis dan Richardson, 2012).

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia berdasar pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang awalnya hanya mengikat perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang sumber daya alam terkait pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. BAPEPAM-LK sebagai otoritas pengawas pasar modal juga memperkuat kewajiban pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dengan mengeluarkan peraturan X.K.6 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik pada agustus 2012 yang mengikat seluruh perusahaan yang terdaftar di pasar modal (BEI) untuk menyampaikan tanggung jawab sosial perusahaan dalam laporan tahunan perusahaannya. Berdasarkan rentang waktu diterbitkannya peraturan yang belum terlampau lama serta aturan yang belum secara jelas mengatur hal-hal yang perlu diungkapkan (UU No. 40 Tahun 2007) (Peraturan X.K.6 Bapepam, 2012) dapat diasumsikan perusahaan-perusahaan di Indonesia masih mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaannya secara *voluntary* dan dapat menggunakannya untuk mengalihkan fokus publik dari aturan lain yang telah mereka langgar demi menjaga citra perusahaan (Deegan *et al* 2002) (Bebbington *et al*, 2008) (Lanis dan Richardson, 2012).

Di sisi lain, terdapat pula penelitian yang menemukan terbatasnya bukti yang mendukung *legitimacy theory* sebagai penjelas antara hubungan tindakan manajemen dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (Wilmshurt dan Frost, 2000) (Deegan *et al* 2002) (Bebbington *et al*, 2008) (Lanis dan Richardson, 2012) (Shabib, 2014). Penelitian

tersebut juga sangat terfokus dalam melihat hubungan langsung antara tindakan pelanggaran aturan dengan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Belum melihat kaitan antara tindakan pelanggaran aturan dengan tingkat kinerja keuangan perusahaan terlebih dahulu yang umumnya menjadi acuan utama (*public concern*) para pelaku pasar dan *stakeholder* lainnya dalam menilai suatu perusahaan (Jamal, 2012). Serta kaitan antara tingkat kinerja keuangan perusahaan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai hal yang saling terkait dalam pengambilan keputusan bisnis di tengah kesadaran pentingnya *environment sustainability* di masa ini (Gamerschlag *et al*, 2011).

Hasil yang beragam ditunjukkan oleh penelitian yang meneliti hubungan tingkat kinerja keuangan perusahaan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Darus *et al* (2013) di Malaysia menemukan pengaruh positif antara kinerja keuangan dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Di sisi lain, Luethge dan Guohong (2012) tidak menemukan pengaruh antara tingkat kinerja keuangan perusahaan dengan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di China. Hal senada juga ditemukan oleh Lanis dan Richardson (2012) di Australia yang menemukan kinerja keuangan tidak berpengaruh secara signifikan atas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Shabib (2015) di Indonesia menemukan bahwa kinerja keuangan tidak berpengaruh terhadap pelanggaran.

Dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut, didapatkan hasil empiris yang tidak konsisten terkait penjelasan pengaruh pelanggaran aturan atau norma dan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (Wilmshurt dan Frost, 2000) (Deegan *et*

*al*, 2002) (Lanis dan Richardson, 2012), (Shabib, 2015). Pengaruh antara pelanggaran aturan keuangan dengan tingkat kinerja keuangan (Baucus, 1997) (Langus dan Motta, 2007) (Jamal, 2012). Pengaruh antara tingkat kinerja keuangan perusahaan dengan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (Gamerschlag *et al*, 2011) (Luethge dan Guohong, 2012) (Darus *et al*, 2013) (Lanis dan Richardson, 2012) juga fokus penelitian yang menghubungkan secara keseluruhan pengaruh tindakan pelanggaran aturan keuangan perusahaan, tingkat kinerja keuangan perusahaan (Jamal, 2012) dan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (Gamerschlag *et al*, 2011) (Luethge dan Gouhong, 2012) (Darus *et al*, 2013) (Lanis dan Richardson, 2012) masih memiliki beberapa keterbatasan, khususnya terkait hubungan antara pengaruh tindakan pelanggaran aturan keuangan dengan tingkat kinerja keuangan perusahaan serta tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di negara yang berbeda. Hal tersebut selaras dengan teori *signalling* yang menegaskan bahwa suatu perusahaan dapat meningkatkan nilai sosial perusahaan tersebut (Bliege Bird *et al*, 2005).

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pelanggaran peraturan keuangan, tekanan keuangan dan kinerja keuangan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Apakah pelanggaran peraturan keuangan, tekanan keuangan dan kinerja keuangan mempengaruhi tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang bergabung dalam Bursa Efek Indonesia?

## KAJIAN PUSTAKA

### **Signaling Theory**

*Signaling theory* (Teori sinyal) mampu menjadi penengah dalam menjelaskan pendekatan materialis dalam ilmu sosial dengan pendekatan yang berpusat pada makna, nilai sosial, dan kebiasaan. Teori ini menggambarkan bagaimana individu mendapatkan manfaat material dari perilaku sosial dengan biaya yang ekonomis. Signaling teori memungkinkan kita untuk mengatasi masalah nilai dengan data empiris yang diuji terkait dengan strategi individu dan dinamika sosial (BliegeBird *et al*, 2005).

*Signaling theory* memberikan dorongan kepada perusahaan dalam memberikan informasi kepada pihak eksternal. Dorongan tersebut timbul akibat asimetri informasi antara pihak manajemen dan pihak eksternal. Agar tidak terjadinya asimetri informasi, maka perusahaan harus mengungkapkan informasi yang dimiliki baik dari sisi keuangan maupun non keuangan. Salah satunya adalah laporan mengenai aktivitas CSR yang harus diungkapkan oleh perusahaan. Tujuan dari pelaporan CSR adalah untuk memberikan sinyal kepada para investor bahwa perusahaan tidak hanya menyajikan informasi keuangan melainkan juga tetap peduli pada lingkungan sekitar perusahaan. Menurut Drever *et al*. (2007) dalam Indrawan dan Mutmainah (2011) *signaling theory* menekankan bahwa perusahaan pelapor dapat meningkatkan nilai perusahaan melalui pelaporannya. Sinyal tersebut diharapkan mampu diterima secara positif oleh pasar sehingga mempengaruhi kinerja perusahaan dan implementasinya terhadap nilai perusahaan.

### **Teori Legitimasi**

Interaksi sosial meniscayakan hadirnya suatu kesepakatan pada suatu komunitas sosial sehingga

masing-masing individu serta golongan merasa saling memiliki dan menjaga satu sama lain (Fakih, 2001). Kesepakatan itu dikenal dengan nama norma atau hukum yang harus dipatuhi oleh seluruh lapisan komunitas sosial tersebut. Dengan kosekuensi akan mendapatkan sanksi jika norma atau hukum tersebut dilanggar (Deegan, 2013). Hal inilah yang mendasari lahirnya teori legitimasi (*legitimacy theory*).

*Legitimacy theory* dalam bidang akuntansi merupakan penjelas atas tindakan suatu organisasi untuk mempertahankan tindakan bisnis dan citra organisasi dengan sistem nilai yang dimiliki oleh masyarakat (Gray *et al*, 1995) (Deegan, 2013). Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa organisasi akan berusaha menciptakan nilai-nilai sosial pada kegiatannya yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku di dalam sistem sosial masyarakat. Karena organisasi merupakan bagian dari sistem tersebut. Keselarasan antara kedua sistem tersebutlah yang membentuk legitimasi perusahaan. Namun ketika terjadi ketidaksielarasan diantara kedua sistem nilai tersebut, maka timbul ancaman bagi legitimasi perusahaan.

### **Pengungkapan Kinerja Keuangan Perusahaan**

Tujuan laporan keuangan yang terdapat dalam Standar Akuntansi Keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009) adalah menyediakan dan mengungkapkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan disusun untuk memenuhi kebutuhan bersama atau sebagian besar pengguna atau dengan kata lain, laporan keuangan merupakan wujud dari legitimasi para pengguna laporan keuangan yang membutuhkan informasi

kinerja keuangan (Deegan, 2013). Atas dasar tersebut, Bapepeam (OJK) sebagai badan yang bertanggungjawab atas pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan melalui peraturan keuangannya mendorong hadirnya informasi kinerja keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan, seperti *understandability*, *relevant*, *reliability*, dan *comparability* (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009) agar dapat berguna sebagai dasar pengambilan keputusan bagi para pelaku bisnis.

### **Pelanggaran Peraturan Keuangan**

Pelanggaran peraturan keuangan secara terminologi definisi sebagai kecurangan laporan keuangan (*financial statement fraud*) yaitu sama-sama digerakkan oleh motif kesengajaan dengan orientasi mendapatkan keuntungan (Rezaee, 2002).

### **Tekanan Keuangan**

Tekanan keuangan merupakan tekanan terhadap perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Dengan menggunakan rasio hutang memungkinkan sebagai proksi permintaan motivasi pembiayaan eksternal (total hutang terhadap jumlah aktiva = LEV). *Leverage* sering digunakan dalam literatur sebagai proksi untuk kedekatan dengan perjanjian dan yang berkaitan dengan keberadaan dan ketatnya persyaratan (Spathis, 2002). Rasio *leverage* juga memungkinkan digunakan sebagai proksi permintaan motivasi pembiayaan eksternal.

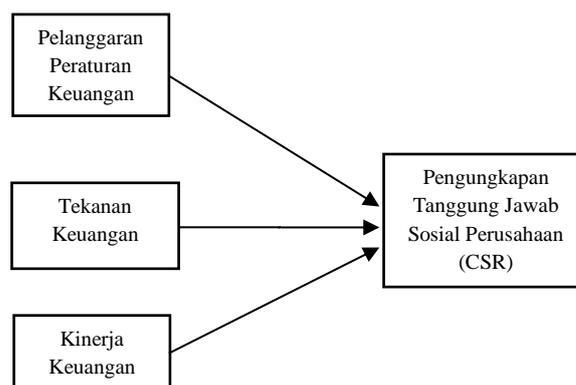
### **Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**

Meskipun pengungkapan informasi keuangan merupakan alat utama yang digunakan dalam menghasilkan keputusan ekonomi. Namun di dalam literatur akuntansi telah berkembang pengungkapan tanggung jawab sosial digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi yang lebih fokus kepada pengungkapan tanggung jawab sosial

perusahaan (Deegan, 2013). Tuntutan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan disebabkan munculnya kesadaran masyarakat dan *stakeholder* lainnya atas pentingnya tanggung jawab bisnis atas lingkungan sekitar demi mencapai keberlanjutan peradaban manusia di masa depan (United Nations, 1987) yang kemudian berkembang dan dikenal dengan istilah *triple bottom line* (*economic, environmental, and social performance*) (Guthrie dan Parker, 1989) (Gray *et al*, 1995) (Deegan, 2013).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan Belkoui & Karpik (1989), Patten (1991), Hackston dan Milne (1996), Wilmshurt dan Forst (2000), Deegan *et al* (2002), Bebbington *et al*, (2008) Lanis dan Richardson (2012), Jamal (2012) dan Shabib (2015) yang menguji fakta empiris mengenai CSR yang dihubungkan dengan teori legitimasi.

Pengungkapan CSR perusahaan dipengaruhi beberapa faktor, menurut teori *signaling*, perusahaan mendapatkan dorongan untuk mengungkapkan informasi kepada pihak eksternal, dan salah satu motivasinya adalah agar perusahaan terlihat baik oleh para pemangku kepentingan sehingga mendapat respon positif meskipun keadaan keuangan perusahaan kurang baik jika dilihat dari *leveragedan* kinerja keuangan



**Hipotesis****Pengaruh Pelanggaran Peraturan terhadap Tingkat Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**

Teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan akan cenderung berusaha mendapatkan legitimasi dari masyarakat demi keberlanjutan operasi bisnisnya meski telah melakukan suatu pelanggaran (Deegan, 2013). Berdasarkan teori sinyal, perusahaan mampu meningkatkan nilai perusahaan tersebut menggunakan beberapa alat, diantaranya adalah pengungkapan CSR. Beberapa penelitian terdahulu juga menemukan beberapa perusahaan yang mencoba mengalihkan pandangan publik untuk tidak fokus kepada masalah atau pelanggaran hukum perusahaan dengan mengungkapkan lebih banyak informasi terkait tanggung jawab sosial perusahaan di laporan tahunan (Patten, 1991) (Deegan *et al* 2002) (Brown dan Deegan, 1998) (Lanis dan Richardson, 2012).

H1 : Pelanggaran Peraturan Keuangan mempengaruhi tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan

**Pengaruh Tekanan Keuangan terhadap Tingkat Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**

Tekanan keuangan dapat mengurangi kepercayaan pemangku kepentingan terhadap perusahaan. Perusahaan dengan rasio leverage yang lebih tinggi akan mengungkapkan lebih banyak informasi, karena biaya keagenan perusahaan dengan struktur modal seperti itu lebih tinggi (Jensen & Meckling, 1976). Berdasarkan teori legitimasi, perusahaan harus mampu mempertahankan citranya kepada pemangku kepentingan. Berdasarkan teori signaling salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan ini adalah memberikan sinyal yang positif, salah satu caranya adalah dengan menggunakan pengungkapan CSR.

Sebab itu perusahaan yang sedang mengalami tekanan keuangan akan cenderung meningkatkan pengungkapan CSR untuk memperbaiki citranya.

H2 : Tekanan keuangan mempengaruhi tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan

**Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Tingkat Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**

Teori legitimasi menjelaskan perusahaan haruslah berusaha menjaga legitimasinya di mata seluruh *stakeholder* agar keberlanjutan perusahaan dapat tetap terjaga (Guthrie & Parker, 1989)(Roberts, 1992) (Deegan *et al*, 2002) (Bewley dan Li, 2000) (Deegan, 2013) (Gamerschlag *et al*, 2011). Umumnya cara yang digunakan perusahaan untuk mencapai keselarasan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat adalah melakukan pengungkapan terkait aktifitas operasi perusahaan yang memiliki dampak sosial lingkungan melalui media laporan tahunan atau iklan di media-media lainnya (Gray *et al*, 1995) (Deegan, 2007) (Gamerschlag *et al*, 2011).Perusahaan umumnya mengungkapkan tanggung jawab sosial yang lebih banyak demi mencapai ekspektasi sosial masyarakat serta pemerintah disekitar daerah operasi bisnisnya untuk meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. (Bewley dan Li, 2000) (Islam dan Deegan, 2010) (Gamerschlag *et al*, 2010)

H3 : Kinerja Keuangan mempengaruhi tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan

**METODE PENELITIAN****Desain Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian *eksplanatory*, dengan pendekatan *hypothetico-*

*deductive* yang bertujuan untuk memperoleh kejelasan fenomena yang terjadi di dunia secara empiris dan berusaha untuk mendapatkan jawaban (*verification*) dengan tujuan untuk menjelaskan pengaruh antara variabel dalam rangka pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan untuk menguji pengaruh tindak pelanggaran peraturan keuangan, tekanan keuangandan kinerja keuangan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2013 dengan alasan, seluruh perusahaan yang listing di bursa efek menjadi objek pengawasan atas kepatuhan peraturan keuangan yang dikeluarkan oleh Bapepam (OJK). Selain itu, rentang tahun yang dipilih diharapkan dapat menggambarkan kondisi yang relatif baru dan aktual di pasar modal Indonesia.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini akan menggunakan metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* adalah pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan subjek peneliti, sampel dipilih berdasarkan pada kesesuaian karakteristik dengan kriteria sampel yang ditentukan agar diperoleh sampel yang representatif (Smith, 2014). Kriteria-kriteria dalam pengambilan sampel secara *purposive sampling* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan yang melakukan pelanggaran peraturan keuangan berdasarkan penilaian Bapepam (OJK).
2. Perusahaan yang dijadikan sampel adalah perusahaan yang diklasifikasikan sebagai perusahaan non-keuangan yang melakukan pelanggaran peraturan keuangan dan mendapatkan sanksi selama tahun 2010-2013.

Perusahaan non keuangan dipilih sebab mayoritas perusahaan yang terdaftar di BEI adalah perusahaan non keuangan, perusahaan non keuangan juga menjadi mayoritas pelanggar peraturan keuangan berdasar data yang dirilis oleh Bapepam (OJK).

3. Perusahaan non keuangan yang mempublikasikan *annual report* dan data keuangan yang dibutuhkan selama tahun 2010-2013.
4. Perusahaan dengan klasifikasi keuangan tidak dilibatkan sebab terdapat perbedaan karakteristik komponen neraca (posisi keuangan) antar dua jenis industri tersebut, selain itu untuk menghindari pengenaan aturan ganda antara OJK dan Bank Indonesia atas perusahaan keuangan.

#### **Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel**

Instrumen penelitian ini dikembangkan dari penelitian-penelitian terdahulu. Adapun variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **Variabel Dependen**

##### **Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tanggung jawab sosial perusahaan. Pada penelitian ini mengadopsi indikator penelitian Hackston dan Milne (1996), Haniffa dan Cooke (2005), Shaw Warn(2004) dalam Said *et al.* (2009) dan dalam Lanis dan Richardson (2012) serta selaras dengan kategori informasi sosial menurut GRI (Global Reporting Index) versi 4,0 yang terdiri atas lingkungan, energi, kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, produk, keterlibatan masyarakat, dan umum. Indeks GRI digunakan sebab meskipun Indonesia telah memiliki panduan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (UU No. 40 tahun

2007 dan Peraturan X.K.6). Namun, pedoman tersebut masih belum sekomprehensif GRI. Sehingga diduga laporan tanggung jawab sosial antar perusahaan akan memiliki perbedaan.

Jumlah item yang diungkapkan perusahaan adalah sejumlah 82 item yang terdiri atas kategori lingkungan (34 item), kategori tenaga kerja (16 item), Kategori Hak Asasi Manusia (12 item), kategori sosial kemasyarakatan (11 item), kategori produk (9 item). Maka rumus untuk pengukuran pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yaitu:

$$n(\text{CSR}) = \frac{\text{Jumlah total pengungkapan CSR}}{\text{Skor Maksimal pengungkapan}}$$

### Tekanan Keuangan

Tekanan keuangan yang diproksikan dengan *leverage*, menggambarkan proporsi total hutang terhadap total aset yang dimiliki perusahaan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui keputusan pendanaan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Tekanan keuangan digunakan dalam penelitian ini sebagai variabel bebas dengan berdasar kepada penelitian sebelumnya yang seringkali menghubungkan *leverage* dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan dasar asumsi, Nilai *leverage* yang tinggi cenderung akan membuat perusahaan lebih banyak mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan, demi menjaga citranya dihadapan pemberi pinjaman (Lanis dan Richardson, 2012). Perhitungan *Leverage* di penelitian ini mengadopsi pendekatan yang digunakan oleh Lanis dan Richardson (2012) dengan persamaan sebagai berikut:

$$LEV = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$$

### Kinerja Keuangan Perusahaan (ROE)

Banyak literatur dan penelitian-penelitian sebelumnya dengan tema penilaian kinerja keuangan

perusahaan dan kaitannya dengan kinerja sosial perusahaan. Menggunakan proksi ROE (*Return on Equity*) sebagai salah satu proksi ukuran kinerja keuangan perusahaan di samping ROA (*Return on Asset*) (Baucus dan Baucus, 1997, Deegan *et al*, 2002, Gamerschlag *et al*, 2011, Jamal, 2012 dan Lanis dan Richardson, 2012). Dengan alasan, ROE merupakan indikator langsung *profitabilitas* perusahaan yang merefleksikan kemampuan menghasilkan laba dibandingkan dengan modal (ekuitas) yang dimiliki perusahaan (Simpson dan Kohers, 2002, Jamal, 2012). ROE seperti ROA juga mampu menunjukkan kemampuan efisiensi perusahaan dalam mengelola *asset* (*assets management*) dan modal yang ditanamkan oleh para pemilik modal (Healy dan Palepu, 2007). Serta, ROE dipandang mampu menggambarkan efektifitas peraturan keuangan yang mengikat perusahaan dalam mencapai kinerja keuangan perusahaan (Baucus dan Baucus, 1997 dan Jamal, 2012).

Atas dasar penjelasan tersebut, maka persamaan ROE (*Return on Equity*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$ROE = \frac{\text{lababersih}}{\text{totalekuitas}}$$

### Variabel Independen

#### Tingkat Pelanggaran Peraturan Keuangan

Variabel eksogen merupakan variabel yang nilainya ditentukan di luar model dan tidak dikenai anak panah yang menunjukkan arah (Ghozali, 2013, Ratmono dan Sholihin, 2013). Variabel eksogen pada penelitian adalah tingkat pelanggaran aturan keuangan yang ditetapkan Bapepam (OJK). Adapun yang menjadi proksi utama variabel tersebut adalah total sanksi tahunan perusahaan yang berbentuk denda dalam nilai Rupiah yang diberikan oleh

Bapepam (OJK). Dengan asumsi semakin besar denda yang diberikan oleh Bapepam (OJK) maka perusahaan tersebut melakukan pelanggaran peraturan keuangan yang semakin berat. Berikut proksi yang digunakan dalam penelitian ini:

*TPPK*

= Nilai Rupiah denda dari Bapepam(OJK)

Proksi tersebut khusus dikembangkan untuk penelitian ini, dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih valid dalam mengukur tingkat pelanggaran peraturan keuangan. Hal tersebut beranjak dari keterbatasan penelitian-penelitian sebelumnya yang memproksikan tindak pelanggaran peraturan atau hukum perusahaan dengan hanya menggunakan variabel *dummy* (Langus dan Motta, 2007, Jamal, 2012 dan Lanis & Richardson, 2012). Sehingga mengalami kesulitan untuk melihat pengaruh secara langsung dari suatu pelanggaran peraturan atau hukum yang dilakukan perusahaan.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi pustaka. Metode ini merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan telaah pustaka, eksplorasi dan mengkaji berbagai sumber seperti buku, jurnal, website perusahaan, laporan tahunan perusahaan periode 2010-2013 atau *sustainability report* 2010-2013, dan dari daftar yang diberikan oleh Bapepam (OJK) terkait daftar perusahaan dan hukuman denda yang telah diberikan kepada perusahaan tersebut. Selanjutnya metode dokumentasi yang merupakan metode pengumpulan data-data sekunder berasal dari sumber yang telah didapatkan. Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dengan mengirim permohonan data pada Bapepam (OJK), mengakses website perusahaan-perusahaan, juga diperoleh melalui website [www.idx.go.id](http://www.idx.go.id).

## Metode Analisis Data

Penelitian ini akan menggunakan teknik analisis regresi berganda dengan bantuan program SPSS menggunakan data yang sebelumnya telah diuji dan memenuhi asumsi klasik.

$$CSR D = \alpha + \beta TPPK + \beta \text{Tekanan Keuangan} + \beta ROE + e_1$$

Penelitian ini menggunakan TPPK (Tingkat pelanggaran peraturan keuangan yang ditetapkan BAPEPAM), *Leverage* (Proporsi total hutang terhadap total asset perusahaan), *ROE* (Kinerja keuangan perusahaan) dan yang menjadi variabel terikat CSR D (*Corporate Social Responsibility Disclosure*) Tingkat pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan

## Hasil Penelitian

### Uji Normalitas

**Tabel 1 Uji Normalitas  
Kolmogorov-Smirnov Test**

		<i>Unstandardized Residual</i>
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		0,167

Sumber: data diolah

Berdasarkan Tabel 3 diperoleh nilai dari *Asymp. Sig.* lebih besar 0,05 maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal.

### Uji Linearitas

**Tabel 2 Uji Lagrange Multiplier**

<i>Model</i>	<i>R Square</i>
1	0,001

Sumber: data diolah

Nilai  $R^2$  sebesar 0,001 dengan jumlah  $n$  observasi 96, maka besarnya nilai  $c^2$  hitung  $96 \times 0,001 = 0,096$ . Nilai ini dibandingkan dengan  $c^2$  tabel dengan  $df (n-k) = 96 - 4 = 92$  dengan tingkat signifikansi 0,05 didapat

nilai  $c^2$  tabel = 115,390. Oleh karena nilai  $c^2$  hitung lebih kecil dari  $c^2$  tabel, maka model yang benar adalah model linear.

#### Uji Multikolinieritas

**Tabel 3 Uji Multikolinieritas**

**Tolerance dan VIF**

Model	Tolerance	VIF
TPPK	0,995	1,005
Leverage	0,898	1,114
ROE	0,897	1,115

Sumber: data diolah

Nilai *tolerance* semua variabel independen  $>0,10$  dan nilai VIF semua variabel independen  $<10,00$  dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas.

#### Uji Autokorelasi

**Tabel 4 Uji Autokorelasi**

**Durbin-Watson**

Model	Durbin Watson
1	1,505

Sumber: data diolah

Nilai DW berada di antara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi.

#### Uji Heterokedastisitas

**Tabel 5 Uji Heterokedastisitas Metode White**

Model	R Square
1	0,216

Sumber: data diolah

Nilai  $R^2 = 0,216$  jumlah  $n$  observasi 96, maka besarnya nilai  $c^2$  hitung =  $96 \times 0,216 = 20,736$ . Nilai ini dibandingkan dengan  $c^2$  tabel dengan  $df$  persamaan =  $96 - 8 = 88$ , dengan tingkat signifikansi 0,05 didapat nilai  $c^2$  tabel = 110,898. Oleh karena nilai  $c^2$  hitung lebih kecil dari  $c^2$  tabel, maka heterokedastisitas dalam model ditolak.

#### Analisis Regresi Berganda

$$CSR D = \alpha + \beta T P P K + \beta L e v e r a g e + \beta R O E + e_1$$

**Tabel 6**

**Pengaruh TPPK, Leverage dan ROE Terhadap CSR D**

Adjusted R Square
0,094

Sumber: data diolah

Besarnya pengaruh TPPK, Leverage dan ROE terhadap CSR D secara simultan adalah 9,4%.

Kelayakan model regresi digambarkan angka-angka dari tabel berikut:

**Tabel 7 Nilai F dan Sig**

F	Sig.
3,915	0,012

Sumber: data diolah

Nilai F tabel  $df_1 = (k-1) = 4 - 1 = 3$  dan  $df_2 = (n-k) = 96 - 4 = 92$ , didapat nilai F tabel = 2,70. F-hitung  $>$  F-tabel, dengan demikian model regresi tersebut sudah layak dan benar serta signifikan dengan signifikansi  $0,012 < \alpha = 0,05$ .

**Tabel 8**

**Pengaruh TPPK, Leverage dan ROE secara parsial terhadap CSR D**

Model	Unstandardized		
	Coefficients Beta	t	Sig.
(Constant)	0,248	1,188	0,238
TPPK	-0,013	-	0,636
Leverage	0,216	0,475	0,006
ROE	-0,021	2,819	0,404
			-
			0,839

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel 8, maka persamaan regresinya sebagai berikut :

$$CSR D = 0,248 - 0,013TPPK + 0,216Leverage - 0, + e_1$$

Didasarkan hasil perhitungan, diperoleh angka t-hitung sebesar  $-0,475 > (-)$  t-tabel sebesar  $-1,98609$ , artinya tidak ada pengaruh TPPK terhadap CSR D, dianggap tidak signifikan dengan angka signifikansi  $0,636 > \alpha = 0,05$ .

Didasarkan hasil perhitungan, diperoleh angka t-hitung sebesar  $2,819 >$  t-tabel sebesar  $1,98609$ , artinya ada pengaruh *Leverage* terhadap CSR D, dianggap signifikan dengan angka signifikansi  $0,006 < \alpha = 0,05$ .

Didasarkan hasil perhitungan, diperoleh angka t-hitung sebesar  $-0,839 > (-)$  t-tabel sebesar  $-1,98609$ , artinya tidak ada pengaruh ROE terhadap CSR D, dianggap tidak signifikan dengan angka signifikansi  $0,404 > \alpha = 0,05$ .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaruh Pelanggaran Pelaporan Keuangan Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Pelanggaran pelaporan keuangan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Lanis dan Richardson (2012) yang menyatakan bahwa pelanggaran pelaporan keuangan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Namun hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Shabib (2015) yang menyatakan bahwa pelanggaran pelaporan keuangan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Lanis dan Richardson (2012) dapat disebabkan oleh perbedaan

tempat penelitian, dimana penelitian tersebut dilakukan pada perusahaan-perusahaan di Australia.

Hasil penelitian ini berbeda dengan teori signaling yang menyatakan bahwa pengungkapan CSR merupakan salah satu cara perusahaan untuk mendapatkan citra yang baik dari pemangku kepentingan. Hal ini dapat diakibatkan karena perusahaan di Indonesia tidak memandang pelanggaran yang dilakukan akan merusak citra perusahaan tersebut, karena informasi mengenai pelanggaran tersebut sulit didapat oleh masyarakat umum.

### Pengaruh Tekanan Keuangan Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Tekanan keuangan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Belkoui & Karpik (1989) yang menyatakan bahwa tekanan keuangan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Berdasarkan teori legitimasi, perusahaan harus mampu mempertahankan citranya kepada pemangku kepentingan. Berdasarkan teori signaling salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan ini adalah memberikan sinyal yang positif, salah satu caranya adalah dengan menggunakan pengungkapan CSR. Sebab itu perusahaan yang sedang mengalami tekanan keuangan akan cenderung meningkatkan pengungkapan CSR untuk memperbaiki citranya. Sinyal tersebut diharapkan mampu diterima secara positif oleh pasar sehingga nantinya akan mempengaruhi pandangan para pemangku kepentingan terhadap nilai perusahaan secara positif,

meskipun perusahaan tersebut sedang memiliki kondisi hutang yang kurang baik.

### **Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**

Kinerja keuangan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hasil temuan ini mendukung hasil penelitian Patten (1991), Hackston & Milne (1996) dan Shabib (2015) yang menunjukkan hasil bahwa kinerja keuangan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Hasil penelitian ini berbeda dengan teori legitimasi yang menyatakan bahwa perusahaan harus melakukan pertanggungjawaban sosial untuk mempertanggungjawabkan bisnisnya dan mempertahankan citranya. Hal ini dapat diakibatkan karena perusahaan belum terlalu memandang penting pengungkapan pertanggungjawaban sosial meskipun perusahaan tersebut memiliki laba.

### **SIMPULAN DAN SARAN**

Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan suatu hal yang menjadi tanggungjawab suatu perusahaan. *Signaling theory* menekankan bahwa perusahaan pelapor dapat meningkatkan nilai perusahaan melalui pelaporannya, dan cara tersebut dapat digunakan perusahaan untuk menutupi kekurangannya. Sinyal tersebut diharapkan mampu diterima secara positif oleh pasar sehingga nantinya akan mempengaruhi kinerja perusahaan dan implementasinya terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini berusaha menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR perusahaan dan mengisi kesenjangan penelitian sebelumnya dengan

menguji secara empiris model kerangka kecurangan laporan keuangan. Penelitian ini dikembangkan dan menguji pengaruh pelanggaran pelaporan keuangan, *Leverage* dan kinerja keuangan terhadap pengungkapan CSR. Penelitian ini menemukan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR

Hasil penelitian ini telah mengisi kesenjangan penelitian oleh Belkoui & Karpik (1989), Patten (1991), Hackston & Milne (1996), Wilmshurt dan Forst (2000), Deegan *et al* (2002), Bebbington *et al*, (2008) Lanis dan Richardson (2012), Jamal (2012) dan Shabib (2015) dengan memberikan hasil yang baru. Oleh karena itu, hasil penelitian ini memiliki implikasi untuk keilmuan dengan memberikan kerangka tentang faktor yang mempengaruhi pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek. Salah satu kelemahan dari penelitian ini adalah keterbatasan informasi dan keterbatasan faktor-faktor yang ditemukan yang hanya dapat menggambarkan 9,4% dari variabel dependen dan kurangnya sampel. Penelitian lebih lanjut dapat menggunakan proksi lainnya, menggunakan beberapa faktor variabel lain yang berkaitan dengan CSR dan menggunakan lebih banyak sampel.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anonim. 2010. ISO 26000: Guidance on Social Responsibility. ISO/FDIS 26000: 2010.
- Baucus, M. S., & Baucus, D. A. (1997). Paying the piper: An empirical examination of longer-term financial consequences of illegal corporate behavior. *Academy of Management Journal*, 40(1), 129-151.

- Bebbington, J., Larrinaga, C., & Moneva, J. M. (2008). Corporate social reporting and reputation risk management. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 21(3), 337-361.
- Belkaoui, A., & Karpik, P. G. (1989). Determinants of the corporate decision to disclose social information. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 2(1).
- Bewley, K., & Li, Y. (2000). Disclosure of environmental information by Canadian manufacturing companies: a voluntary disclosure perspective. *Advances in environmental accounting and management*, 1(1), 201-226.
- BliegeBird, R., Smith, E., Alvard, M., Chibnik, M., Cronk, L., Giordani, L., Hagen, E., Hammerstein, P., Neiman, F., Bird, R. and Smith, E., 2005. Signaling theory, strategic interaction, and symbolic capital 1. *Current anthropology*, 46(2), pp.221-248.
- Brown, N., & Deegan, C. (1998). The public disclosure of environmental performance information—a dual test of media agenda setting theory and legitimacy theory. *Accounting and business research*, 29(1), 21-41.
- Christensen, J., & Murphy, R. (2004). The social irresponsibility of corporate tax avoidance: Taking CSR to the bottom line. *Development*, 47(3), 37-44.
- Darus, F., Hamzah, E. A. C. K., & Yusoff, H. (2013). CSR web reporting: The influence of ownership structure and mimetic isomorphism. *Procedia Economics and Finance*, 7, 236-242.
- Deegan, C., Rankin, M., & Tobin, J. (2002). An examination of the corporate social and environmental disclosures of BHP from 1983-1997: A test of legitimacy theory. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 15(3), 312-343.
- Deegan, C. (2013). *Financial accounting theory*. McGraw-Hill Education Australia.
- Drever, M., Stanton P., and McGowan S. 2007. *Contemporaray Issues in Accounting*. dipublikasi John Wiley & Sons, Australia
- Fakih, M, 2001, *Runtuhnya Teori Pembangunan and Globalisasi*. InsistPress, Yogyakarta
- Freedman, J. (2003). Tax and corporate responsibility. *Tax Journal*, 695(2), 1-4.
- Gamerschlag, R., Möller, K., & Verbeeten, F. (2011). Determinants of voluntary CSR disclosure: empirical evidence from Germany. *Review of Managerial Science*, 5(2-3), 233-262.
- Ghozali, I, 2013, *Aplikasi Analisis multivariate dengan program IBM SPSS 21*. Penerbit Universitas Diponegoro Semarang
- Gray, R., Kouhy, R., & Lavers, S. (1995). Corporate social and environmental reporting: a review of the literature and a longitudinal study of UK disclosure. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 8(2), 47-77.
- Guthrie, J., & Parker, L. D. (1989). Corporate social reporting: a rebuttal of legitimacy theory. *Accounting and business research*, 19(76), 343-352.
- Hackston, D., & Milne, M. J. (1996). Some determinants of social and environmental disclosures in New Zealand companies. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 9(1), 77-108.
- Haniffa, R. M., & Cooke, T. E. (2005). The impact of culture and governance on corporate social reporting. *Journal of accounting and public policy*, 24(5), 391-430.
- Healy, P. M., & Palepu, K. G. (2007). *Business analysis and valuation: Using financial statements*.

- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009, Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Salemba Empat
- Indrawan, D. C., MUTMAINAH, S., & Mutmainah, S. (2011). Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja Perusahaan. Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro.
- Islam, M. A., & Deegan, C. (2010). Media pressures and corporate disclosure of social responsibility performance information: a study of two global clothing and sports retail companies. *Accounting and Business Research*, 40(2), 131-148.
- Jamal Zeidan, M. (2012). The effects of violating banking regulations on the financial performance of the US banking industry. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 20(1), 56-71.
- Jensen, M.C. and Meckling, W.H., 1976. Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of financial economics*, 3(4), pp.305-360.
- Landolf, U. (2006). Tax and corporate responsibility. *International Tax Review*, 29(July), 6-9.
- Langus, G., & Motta, M. (2007). The effect of EU antitrust investigations and fines on a firm's valuation.
- Lanis, R., & Richardson, G. (2012). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: An empirical analysis. *Journal of Accounting and Public Policy*, 31(1), 86-108.
- Lanis, R., & Richardson, G. (2012). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: a test of legitimacy theory. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 26(1), 75-100.
- Luethge, D., & Guohong Han, H. (2012). Assessing corporate social and financial performance in China. *Social Responsibility Journal*, 8(3), 389-403.
- Patten, D.M., 1991, "Exposure, Legitimacy, and Social Disclosure", *Journal of Accounting and Public Policy*, Vol. 10, pp. 297-308.
- Peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan (LK) Nomor X.K.6 didownload dari [www.bapepam.go.id](http://www.bapepam.go.id).
- Ratmono, D., and Solihin, M. 2013, Analisis SEM PLS dengan WrapPLS 3.0 untuk hubungan nonlinear dalam Penelitian Sosial dan Bisnis. Andi, Yogyakarta.
- Rezaee, Z. (2002). *Financial statement fraud: prevention and detection*. John Wiley & Sons.
- Roberts, R. W. (1992). Determinants of corporate social responsibility disclosure: An application of stakeholder theory. *Accounting, Organizations and Society*, 17(6), 595-612.
- Said, R., Hj Zainuddin, Y., & Haron, H. (2009). The relationship between corporate social responsibility disclosure and corporate governance characteristics in Malaysian public listed companies. *Social Responsibility Journal*, 5(2), 212-226.
- Shabib, Habib M. (2015). Pelanggaran Peraturan Keuangan Bapepam (OJK), Kinerja Keuangan, dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Suatu Pengujian Teori Legitimasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Non Financial Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2013). Tesis Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Sikka, P. (2010, December). Smoke and mirrors: Corporate social responsibility and tax avoidance. In *Accounting Forum* (Vol. 34, No. 3, pp. 153-168). Elsevier.
- Simpson, W. G., & Kohers, T. (2002). The link between corporate social and financial performance: Evidence from the banking industry. *Journal of business ethics*, 35(2), 97-109.

- Slemrod, J. (2004). The economics of corporate tax selfishness (No. w10858). National Bureau of Economic Research.
- Smith, M. (2014). Research methods in accounting. Sage.
- Spathis, C. T. (2002). Detecting false financial statements using published data: some evidence from Greece. *Managerial Auditing Journal*, 17(4), 179-191.
- United Nations, (1987). World Commission on Environment and Development Sustainability, Oxford, University Press.
- UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Williams, D.F, 2007, Tax and Corporate Responsibility, KPMG, London
- Wilmshurst, T. D., & Frost, G. R. (2000). Corporate environmental reporting: a test of legitimacy theory. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 13(1), 10-26.